

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Laporan Keuangan Tahunan ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, tidak ada realisasi pendapatan dan pembiayaan sedangkan realisasi Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.612.581.762,00 atau 88,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp 4.100.000.000,00.
2. Laporan Operasional (LO) memberikan informasi tentang pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Berdasarkan laporan ini tidak ada realisasi pendapatan, transfer, dan pos-pos luar biasa sedangkan untuk realisasi beban per 31 Desember 2019 adalah Rp 3.684.825.041,00.
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan ini, ekuitas per 31 Desember 2019 adalah Rp 269.348.921,00.

4. Dari neraca Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 diinformasikan bahwa jumlah aset adalah sebesar Rp 269.348.921,00, kewajiban sebesar Rp 0,00, dan ekuitas sebesar Rp 269.348.921,00.
5. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang profil organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Semoga Laporan Keuangan Tahun 2019 ini bisa memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, tetapi kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palangkaraya, 31 Januari 2020

**Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM,**

**SAID SALIM, S.Kom  
Pembina  
NIP. 197207041993031004**

DAFTAR ISI		
Kata Pengantar		1
Daftar Isi		3
Pernyataan Tanggung jawab		4
Ringkasan		5
Laporan Realisasi Anggaran		5
Laporan Operasional		5
Laporan Perubahan Ekuitas		6
Neraca		6
Catatan atas Laporan Keuangan		7
Bab I	Pendahuluan	12
	A. Maksud dan tujuan	12
	B. Landasan hukum	12
	C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	14
Bab II	Profil Organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD	15
	A. Profil organisasi	15
	B. Kebijakan keuangan	16
	C. Indikator pencapaian target kinerja APBD	17
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	19
	A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	19
	B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	24
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	25
	A. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	25
	B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	25
	C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	27
	D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	39
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	40
	A. Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan	40
	5.1.1 Pendapatan	40
	5.1.2 Belanja	40
	5.1.3 Beban	42
	5.1.4 Aset	47
	5.1.5 Kewajiban	51
	5.1.6 Ekuitas	51
Bab VI	Penutup	52
	Daftar Lampiran	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Januari 2020

**Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM,**

**SAID SALIM, S.Kom  
Pembina  
NIP. 197207041993031004**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 berupa pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 0,00. Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 3.612.581.762,00 atau mencapai 88,11% dari anggarannya sebesar Rp 4.100.000.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

	Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00
Belanja	4.100.000.000,00	3.612.581.762,00

2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Tidak ada realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan realisasi beban pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 3.684.825.043,00. Ringkasan Laporan Operasional (LO) Tahun 2019 dan Tahun 2018 dapat disajikan

sebagai berikut:

(dalam Rupiah)				
Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban	3.684.825.043,00	3.735.383.763,00	(50.558.722,00)	(1,35)
Surplus/Defisit- LO	(3.684.825.043,00)	(3.735.383.763,00)	(50.558.722,00)	(1,35)

3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan disandingkan dengan tahun sebelumnya.

(dalam Rupiah)		
Uraian	2019	2018
Ekuitas awal	341.592.202,00	372.059.016,00
Surplus/Defisit-LO	(3.684.825.043,00)	(3.735.383.763,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikondolidasikan	3.612.581.762,00	3.704.916.949,00
Ekuitas Akhir	269.348.921,00	341.592.202,00

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset adalah sebesar Rp 269.348.921,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 0,00, aset tetap sebesar Rp 269.348.921,00, aset lainnya sebesar Rp 0,00. Sementara itu jumlah kewajiban adalah sebesar Rp 0,00 dan ekuitas sebesar Rp 269.348.921,00.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset		
- Aset lancar	0,00	0,00
- Aset tetap	269.348.921,00	341.592.202,00
- Aset lainnya	0,00	0,00
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas	(269.348.921,00)	(341.592.202,00)

## **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CALK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2018
		ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	4.100.000.000,00	3.612.581.762,00	(487.418.238,00)	88,11	3.704.916.949,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.986.790.100,00	3.502.263.319,00	(484.526.781,00)	87,84	3.544.052.949,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	497.690.000,00	470.428.750,00	(27.261.250,00)	94,52	449.490.000,00
5.1.1.08	Belanja Honorarium PNS	201.290.000,00	184.740.000,00	(16.550.000,00)	91,77	180.690.000,00
5.1.1.10	Belanja Honorarium Non PNS	296.400.000,00	285.688.750,00	(10.711.250,00)	96,38	268.800.000,00
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.489.100.100,00	3.031.834.569,00	(457.265.531,00)	86,89	3.094.562.949,00
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.795.600,00	143.928.450,00	(14.867.150,00)	90,63	143.903.150,00
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	11.500.000,00	(8.500.000,00)	57,50	15.250.000,00
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.952.000,00	8.441.035,00	(510.965,00)	94,29	8.064.000,00
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.588.000,00	55.255.625,00	(15.332.375,00)	78,27	93.734.800,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir	8.000.000,00	1.500.000,00	(6.500.000,00)	18,75	0,00
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.450.000,00	750.000,00	(700.000,00)	51,72	6.000.000,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.487.500,00	59.262.500,00	(63.225.000,00)	48,38	54.507.500,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.070.449.000,00	2.740.946.959,00	(329.502.041,00)	89,26	2.744.803.499,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	28.378.000,00	10.250.000,00	(18.128.000,00)	36,11	28.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL	113.209.900,00	110.318.443,00	(2.891.457,00)	97,44	160.864.000,00
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	113.209.900,00	110.318.443,00	(2.891.457,00)	97,44	160.864.000,00
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur	9.867.004,00	9.768.334,00	(98.670,00)	99,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor	15.180.000,00	15.027.309,00	(152.691,00)	98,99	33.069.000,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	88.162.896,00	85.522.800,00	(2.640.096,00)	97,00	127.795.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.100.000.000,00)	(3.612.581.762,00)	487.418.238,00	88,11	(3.704.916.949,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.100.000.000,00)	(3.612.581.762,00)	487.418.238,00	88,11	(3.704.916.949,00)



LAPORAN OPERASIONAL (LO)

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

NO.URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6
9	BEBAN	3.684.825.043,00	3.735.383.763,00	(50.558.720,00)	(1,35)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai-LO	470.428.750,00	449.490.000,00	20.938.750,00	4,66
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	3.031.834.569,00	3.094.562.949,00	(62.728.380,00)	(2,03)
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.561.724,00	191.330.814,00	(8.769.090,00)	(4,58)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(3.684.825.043,00)	(3.735.383.763,00)	50.558.720,00	(1,35)
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO				
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.684.825.043,00)	(3.735.383.763,00)	50.558.720,00	(1,35)
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.684.825.043,00)	(3.735.383.763,00)	50.558.720,00	(1,35)

NERACA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NERACA

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PER 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018	Kenaikan (penurunan)
			Jumlah
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>Kas</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.276.172.129,00	1.165.853.686,00	110.318.443,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.006.823.208,00)	(824.261.484,00)	(182.561.724,00)
<b>Jumlah</b>	<b>269.348.921,00</b>	<b>341.592.202,00</b>	<b>(72.243.281,00)</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>269.348.921,00</b>	<b>341.592.202,00</b>	<b>(72.243.281,00)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	269.348.921,00	341.592.202,00	(72.243.281,00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>269.348.921,00</b>	<b>341.592.202,00</b>	<b>(72.243.281,00)</b>

---

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

###### a. Maksud

Sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam selama satu periode pelaporan.

###### b. Tujuan

Untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

##### B. LANDASAN HUKUM

Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pemerintahan Berbasis Akual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 3);
  13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 55);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
  15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 23).

## **C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- BAB I     PENDAHULUAN
  - A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - B. Landasan Hukum
  - C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II    PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDBIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
  - A. Profil Organisasi
  - B. Kebijakan Keuangan
  - C. Pencapaian Target Kinerja APBD Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Bab III   IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
  - A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV    KEBIJAKAN AKUNTANSI
  - A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - C. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- BAB V     PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
  - A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
    - 1. Pendapatan
      - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 2. Belanja
      - a. Belanja Barang dan Jasa
      - b. Belanja Modal
    - 3. Beban
      - a. Beban Pegawai - LO
      - b. Beban Barang dan Jasa
      - c. Beban Penyusutan dan Amortisasi
    - 4. Aset
      - a. Aset Lancar
      - b. Aset Tetap
      - c. Aset Lain-lain
    - 5. Kewajiban
      - a. Kewajiban Jangka Pendek
      - b. Kewajiban Jangka Panjang
    - 6. Ekuitas
- BAB VI    PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- BABVII    PENUTUP

## **BAB II**

### **PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

#### **A. PROFIL ORGANISASI**

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Kedudukan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah yang berada di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk di bidang perekonomian, promosi, investasi, dan sumber daya alam serta memantau perkembangannya, pelaporan bidang bina promosi, investasi dan pariwisata, bina sarana perekonomian, bina pengelolaan sumber daya alam, produksi dan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi yaitu :

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam.
2. Penyusunan bahan perencanaan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam.
3. Pengumpulan data penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan, pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya.
4. Pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan sektor sarana perekonomian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya.
5. Penyusunan bahan pelaksanaan administrasi bidang perekonomian dan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana produksi dan budidaya, promosi, pariwisata dan investasi.

6. Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam.
7. Penyusunan penyelenggaraan sistem informasi bidang perekonomian dan sumber daya alam.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **B. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Sehubungan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota, untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya se-optimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang merupakan sinkronisasi agenda pembangunan nasional dan juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2019 yaitu :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah.
- b. Pemerataan infrastruktur wilayah.



- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai.
- d. Stabilitas ekonomi daerah.
- e. Peningkatan pendapatan masyarakat.
- f. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi.
- g. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- h. Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata.
- i. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Ke-sepuluh prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan realisasi sampai dengan tahun 2019, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2019, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2019 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan sertapembiayaan yang disesuaikan dengan target pendapatan.

**C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDBIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja (data terlampir).

No	Nomor DPA/DPPA	Nomor Kode dan Nama Program / Kegiatan		Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)	
					S	R	Narasi	Satuan (Unit)
1	2	3		4	5	6	7	8
		4.06.4.06.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	188.44/463/DPPA-SKPD/2019	4.06.4.06.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	511.142.000	490.094.785	95,88	Terlaksananya administrasi pengelolaan uang dan barang	1 Tahun
2		4.06.4.06.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000	99.944.950	99,94	Tersedianya ATK 1 tahun	1 Tahun
3		4.06.4.06.01.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	113.209.900	110.318.443	97,44	Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 tahun anggaran	1 Tahun (GPS, Filling Kabinet, Lemari Besi, Komputer, Printer)
		4.06.4.06.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
4		4.06.4.06.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	9.500.000	95	Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun
		4.06.4.06.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
5		4.06.4.06.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	110.000.000	73.320.871	66,65	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan sesuai tugas dan fungsinya	10 orang dalam daerah
6		4.06.4.06.01.04.05.138	Mengikuti orientasi tugas dan fungsi SKPD terkait	275.000.000	247.737.800	90,08	Aparatur yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam	15 orang aparatur
7		4.06.4.06.01.04.05.33	Rapat koordinasi pemberdayaan perekonomian daerah	51.527.000	0	0	Terselenggaranya rapat koordinasi pemberdayaan perekonomian daerah	1 kali

		4.06.4.06.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
8		4.06.4.06.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.911.600	2.874.000	73,47	1 dokumen (LKIP)	1 dokumen (LKIP)
		4.06.4.06.01.04.29	PROGRAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					
9		4.06.4.06.01.04.29.01	Koordinasi pengembangan promosi daerah dan investasi	260.000.000	226.798.520	87,23	Laporan pengembangan promosi dan investasi	1 set dokumen laporan
10		4.06.4.06.01.04.29.02	Koordinasi pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	150.725.000	138.945.803	92,18	Jumlah laporan pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	1 set dokumen laporan
11		4.06.4.06.01.04.29.03	Koordinasi movev SDA dan lingkungan hidup	266.957.500	253.344.500	94,90	Jumlah dokumen pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	1 dokumen laporan
12		4.06.4.06.01.04.29.08	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha daerah/BUMD dan perbankan	260.000.000	234.868.465	90,33	Dokumen laporan kebijakan ekonomi pada bidang usaha daerah / BUMD dan perbankan Se-Kalimantan Tengah	1 set dokumen laporan
13		4.06.4.06.01.04.29.09	Koordinasi pengembangan sektor kehutanan	250.000.000	210.972.934	84,38	Dokumen administrasi pengembangan sektor kehutanan Kalimantan Tengah	1 set dokumen laporan
14		4.06.4.06.01.04.29.12	Koordinasi pengembangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan	84.000.000	76.421.120	90,97	Laporan administrasi pengembangan SDA kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah	1 dokumen
15		4.06.4.06.01.04.29.14	Koordinasi pengembangan sektor perkebunan	285.000.000	191.158.464	67,07	Dokumen laporan administrasi pengembangan sektor perkebunan Kalimantan Tengah	1 set dokumen laporan
16		4.06.4.06.01.04.29.15	Koordinasi pengembangan sektor pertanian	100.000.000	95.024.091	95,02	Tersedianya data pengembangan sektor pertanian Kalimantan Tengah	1 set dokumen laporan
17		4.06.4.06.01.04.29.16	Koordinasi pengembangan kawasan agropolitan	140.000.000	131.431.220	93,87	Tersediannya laporan dan data kawasan agropolitan Kalimantan Tengah	1 set dokumen laporan
18		4.06.4.06.01.04.29.28	Koordinasi penyuluh Provinsi Kalimantan Tengah	152.000.000	147.159.250	96,81	Laporan koordinasi kegiatan penyuluh di wilayah Kalteng	1 set dokumen laporan
19		4.06.4.06.01.04.29.29	Koordinasi pengawasan dan pengendalian harga komoditi industri dan perdagangan	185.000.000	176.966.700	95,65	Laporan koordinasi pengawasan dan pengendalian harga komoditi industri dan perdagangan	1 set dokumen laporan
20		4.06.4.06.01.04.29.31	Koordinasi pengembangan sektor kepariwisataan daerah	150.000.000	144.310.910	96,20	Laporan koordinasi pengembangan sektor kepariwisataan daerah Kalimantan Tengah	1 set dokumen laporan
21		4.06.4.06.01.04.29.35	Koordinasi Pengembangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	250.000.000	176.194.261	70,47	Dokumen laporan koordinasi pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral	1 dokumen laporan
22		4.06.4.06.01.04.29.37	Koordinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	51.527.000	39.209.800	76,09	Terselenggaranya Rapat Kerja Teknis pengembangan ekonomi kreatif	1 kali
		4.06.4.06.01.04.68	PROGRAM PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH					
23		4.06.4.06.01.04.68.01	Koordinasi Movev Pemberdayaan Perekonomian dan SDA	340.000.000	335.984.875	98,81	Jumlah laporan koordinasi movev pemberdayaan perekonomian dan SDA	1 set dokumen laporan
			JUMLAH	4.100.000.000	3.612.581.762	88,11		

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagai gambaran dan bahan evaluasi pencapaian target kinerja keuangan, data mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2019 dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

No.	Nama Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Keuangan (%)	Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi Keuangan (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran (Rp.)	Ket.
1	2	3			4			7
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Belanja Langsung	100	95,88	511.142.000	490.094.785	21.047.215
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100	95,21	69.000.000	65.700.000	3.300.000
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100	42,85	1.750.000	750.000	1.000.000
			Honorarium Pengelola Uang dan Barang	100	95,26	116.040.000	110.540.000	5.500.000
			Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	100	96,38	296.400.000	285.688.750	10.711.250
			Belanja Premi Asuransi Kesehatan	100	94,29	8.952.000	8.441.035	510.965
			Belanja Penggandaan	100	100	15.000.000	15.000.000	0
			Belanja Penjilidan	100	99,37	4.000.000	3.975.000	25.000
	1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Belanja Langsung	100	99,94	100.000.000	99.944.950	55.050
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	99,94	98.950.000	98.894.950	55.050
			Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100	100	1.050.000	1.050.000	0
	1.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Belanja Langsung	100	97,44	113.209.900	110.318.443	2.891.457
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Ukur Universal	100	99	9.867.004	9.768.334	98.670
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	100	98,99	15.180.000	15.027.309	152.691
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100	96,29	64.633.896	62.238.000	2.395.896
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	100	96,29	23.529.000	23.284.800	244.200
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Belanja Langsung	100	95	10.000.000	9.500.000	500.000
			Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	100	95	10.000.000	9.500.000	500.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Belanja Langsung	100	64,28	110.000.000	73.320.871	36.679.129

			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	48,75	6.000.000	2.925.000	3.075.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	79,53	75.622.000	60.145.871	15.476.129	
			Belanja Bimbingan Teknis	100	36,11	28.378.000	10.250.000	18.128.000	
	3.2	Mengikuti Orientasi Tugas dan Fungsi SKPD Terkait	Belanja Langsung	100	90,08	275.000.000	247.737.800	27.262.200	
			Belanja Penggandaan	100	100	1.948.000	1.948.000	0	
			Belanja Penjilidan	100	100	200.000	200.000	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	94,91	197.230.000	187.205.000	10.025.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	77,20	75.622.000	58.384.800	17.237.200	
	3.3	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perekonomian Daerah	Belanja Langsung	100	0	51.527.000	0	51.527.000	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100	0	6.750.000	0	6.750.000	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	0	9.700.000	0	9.700.000	
			Belanja Bahan Dekorasi	100	0	500.000	0	500.000	
			Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100	0	4.000.000	0	4.000.000	
			Belanja Penggandaan	100	0	6.127.000	0	6.127.000	
			Belanja Penjilidan	100	0	600.000	0	600.000	
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	100	0	2.500.000	0	2.500.000	
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100	0	700.000	0	700.000	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	0	12.000.000	0	12.000.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	0	8.650.000	0	8.650.000	
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Belanja Langsung	100	73,47	3.911.600	2.874.000	1.037.600	
			Honorarium PNS Lainnya	100	100	1.800.000	1.800.000	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	99,90	105.100	105.000	100	
			Belanja Penggandaan	100	100	769.000	769.000	0	
			Belanja Penjilidan	100	100	200.000	200.000	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	0	337.500	0	337.500	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	0	700.000	0	700.000	
5		Program Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam							
	5.1	Koordinasi pengembangan promosi daerah dan investasi	Belanja Langsung	100	87,23	260.000.000	226.798.520	33.201.480	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	2.795.000	2.795.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	72,03	4.082.500	2.941.000	1.141.500	
			Belanja Penjilidan	100	0	600.000	0	600.000	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	0	3.812.500	0	3.812.500	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	96,79	173.530.000	167.965.000	5.565.000	

			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	70,62	75.180.000	53.097.520	22.082.480	
	5.2	Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Belanja Langsung	100	92,18	150.725.000	138.945.803	11.779.197	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	2.035.000	2.035.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	100	1.783.500	1.783.500	0	
			Belanja Penjilidan	100	100	1.000.000	1.000.000	0	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	0	3.812.500	0	3.812.500	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	92,31	101.650.000	93.840.000	7.810.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	99,61	40.444.000	40.287.303	156.697	
	5.3	Koordinasi Monev SDA dan Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	100	94,90	266.957.500	253.344.500	13.613.000	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	3.951.000	3.951.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	91,75	1.304.500	1.197.000	107.500	
			Belanja Penjilidan	100	100	200.000	200.000	0	
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	100	0	1.500.000	0	1.500.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	24,96	6.750.000	1.685.000	5.065.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	99,54	171.200.000	170.425.000	775.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	92,48	82.052.000	75.886.500	6.165.500	
	5.4	Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah/BUMD dan Perbankan	Belanja Langsung	100	90,33	260.000.000	234.868.465	25.131.535	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	97,74	4.448.000	4.347.500	100.500	
			Belanja Penggandaan	100	100	2.783.000	2.783.000	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	0	3.375.000	0	3.375.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	96,69	188.510.000	182.285.000	6.225.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	74,65	60.884.000	45.452.965	15.431.035	
	5.5	Koordinasi pengembangan sektor kehutanan	Belanja Langsung	100	84,38	250.000.000	210.972.934	39.027.066	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	3.700.000	3.700.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	91,07	3.831.000	3.489.250	341.750	
			Belanja Penjilidan	100	0	500.000	0	500.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	32,02	7.025.000	2.250.000	4.775.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	84,92	158.270.000	134.406.000	23.864.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	87,54	76.674.000	67.127.684	9.546.316	
	5.6	Koordinasi pengembangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan	Belanja Langsung	100	90,97	84.000.000	76.421.120	7.578.880	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	948.000	948.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	0	446.500	0	446.500	
			Belanja Penjilidan	100	0	240.000	0	240.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	0	1.687.500	0	1.687.500	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	95,90	65.020.000	62.360.000	2.660.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	83,74	15.658.000	13.113.120	2.544.880	
	5.7	Koordinasi pengembangan sektor perkebunan	Belanja Langsung	100	67,07	285.000.000	191.158.464	93.841.536	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	3.617.500	3.617.500	0	
			Belanja Penggandaan	100	81,03	4.469.500	3.621.875	847.625	
			Belanja Penjilidan	100	100	500.000	0	500.000	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	29,50	7.625.000	2.250.000	5.375.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	84,06	181.480.000	152.565.000	28.915.000	

			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	33,33	87.308.000	29.104.089	58.203.911	
	5.8	Koordinasi pengembangan sektor pertanian	Belanja Langsung	100	95,02	100.000.000	95.024.091	4.975.909	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	2.937.000	2.937.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	0	500.000	0	500.000	
			Belanja Penjilidan	100	0	240.000	0	240.000	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	0	2.025.000	0	2.025.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	99,44	70.860.000	70.465.000	395.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	92,25	23.438.000	21.622.091	1.815.909	
	5.9	Koordinasi pengembangan kawasan agropolitan	Belanja Langsung	100	93,87	140.000.000	131.431.220	8.568.780	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	35,20	4.630.000	1.630.000	3.000.000	
			Belanja Penggandaan	100	100	938.000	938.000	0	
			Belanja Penjilidan	100	0	240.000	0	240.000	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	0	5.000.000	0	5.000.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	99,77	95.120.000	94.905.000	215.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	99,66	34.072.000	33.958.220	113.780	
	5.10	Koordinasi Kelembagaan Penyuluh Provinsi Kalimantan Tengah	Belanja Langsung	100	79,84	152.000.000	147.159.250	4.840.750	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	1.512.000	1.512.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	60,24	1.303.000	758.000	545.000	
			Belanja Penjilidan	100	0	240.000	0	240.000	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	0	2.025.000	0	2.025.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	99,88	97.190.000	97.080.000	110.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	96,13	49.730.000	47.809.250	1.920.750	
	5.11	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Harga Komoditi Industri dan Perdagangan	Belanja Langsung	100	92,81	185.000.000	171.705.584	13.294.416	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	1.795.000	1.795.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	100	417.500	417.500	0	
			Belanja Penjilidan	100	0	120.000	0	120.000	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	0	1.687.500	0	1.687.500	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	98,18	143.140.000	140.535.000	2.605.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	90,43	37.840.000	34.219.200	3.620.800	
	5.12	Koordinasi Pengembangan Sektor Kepariwisata Daerah	Belanja Langsung	100	96,20	150.000.000	144.310.910	5.689.090	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	1.350.000	1.350.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	100	4.903.000	4.903.000	0	
			Belanja Penjilidan	100	100	2.000.000	2.000.000	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	0	2.025.000	0	2.025.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	96,61	106.710.000	103.100.000	3.610.00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	99,83	33.012.000	32.957.910	54.090	
	5.13	Koordinasi Pengembangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung	100	70,47	250.000.000	176.194.261	73.805.739	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	100	3.642.000	3.642.000	0	
			Belanja Penggandaan	100	15,32	1.958.000	300.000	1.658.000	
			Belanja Penjilidan	100	100	200.000	200.000	0	
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	100	0	1.500.000	0	1.500.000	

			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	73,37	6.750.000	4.952.500	1.797.500	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	95	136.490.000	129.670.000	6.820.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	37,63	99.460.000	37.429.761	62.030.239	
	5.14	Koordinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	<b>Belanja Langsung</b>	<b>100</b>	<b>76,09</b>	<b>51.527.000</b>	<b>39.209.800</b>	<b>12.317.200</b>	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100	100	5.950.000	5.950.000	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	78,15	6.055.000	4.732.000	1.323.000	
			Belanja Bahan Dekorasi	100	100	500.000	500.000	0	
			Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100	50	6.000.000	2.000.000	4.000.000	
			Belanja Penggandaan	100	98,09	3.038.000	2.980.000	58.000	
			Belanja Penjilidan	100	50	500.000	250.000	250.000	
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	100	60	2.500.000	1.500.000	1.000.000	
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100	100	750.000	750.000	0	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	58,33	12.000.000	7.000.000	5.000.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	95,17	14.234.000	13.547.800	686.200	
6.	Program Pengendalian Perekonomian Daerah								
	6.1	Koordinasi Monev Pemberdayaan Perekonomian dan SDA	<b>Belanja Langsung</b>	<b>100</b>	<b>98,81</b>	<b>340.000.000</b>	<b>335.984.875</b>	<b>4.015.125</b>	
			Belanja Alat Tulis Kantor	100	95,87	4.575.000	4.386.500	188.500	
			Belanja Penggandaan	100	99,78	2.106.000	2.101.500	4.500	
			Belanja Penjilidan	100	100	1.300.000	1.300.000	0	
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100	92,31	44.550.000	41.125.000	3.425.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100	99,89	163.595.000	163.420.000	175.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	99,82	123.874.000	123.651.875	222.125	

## **B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tidak terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perekonomian Daerah.



## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

#### B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

##### 1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas akrual.

**Basis akrual** adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

- b. Pendapatan diakui pada saat hak telah **diperoleh** (*earned*) dan beban diakui pada saat kewajiban **timbul** atau sumber daya **dikonsumsi**.

##### 2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

**3. Prinsip realisasi (*realization principle*);**

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

**4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);**

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

**5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);**

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

**6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);**

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

**7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);**

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

**8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).**

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.  
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan

terlalu rendah.

## **C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

### **1. Periode Akuntansi**

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

### **2. Pos-Pos Neraca**

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

#### **a. Aset**

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

#### **1) Aset Lancar**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

##### **a) Kas di Kas Daerah**

- (01) Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (02) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(03) Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

**b) Kas di Bendahara Pengeluaran**

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

(01) Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

(02) Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

**2) PIUTANG**

- a) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b) Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- c) Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- d) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- e) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
  - Klarifikasi piutang menurut umur
  - Klarifikasi piutang menurut debitur

**3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL**

- a) Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dan sebagainya.
- c) Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- d) Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- e) Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
  - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.

- Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- f) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

#### **4) INVESTASI JANGKA PANJANG**

- a) Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
  - Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
  - Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- c) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- d) Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- e) Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- f) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- g) Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

### **5) ASET TETAP**

- a) Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap antara lain terdiri dari :
  - Tanah
  - Jalan dan Jembatan
  - Bangunan Air (irigasi)
  - Instalasi
  - Jaringan
  - Bangunan Gedung
  - Bangunan Monumen
  - Alat-Alat Besar
  - Alat Angkutan
  - Alat Bengkel dan Alat Ukur
  - Alat Pertanian
  - Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
  - Alat Studio dan Alat Komunikasi
  - Alat-Alat Kedokteran
  - Alat-Alat Laboratorium
  - Buku dan Perpustakaan
  - Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
  - Hewan Ternak dan Tumbuhan
  - Alat Keamanan
- d) Penjelasan Akun Aset Tetap
  - Tanah  
Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.
  - Jalan dan Jembatan  
Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.
  - Bangunan Air (Irigasi)  
Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.
  - Instalasi  
Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi

pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

- Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

- Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

- Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Pertanian

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

- Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

- Alat-alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

- Buku dan Perpustakaan  
Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan  
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.
- Hewan/Ternak dan Tumbuhan  
Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.
- Alat Keamanan  
Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

#### **e) Pengakuan**

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena



meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

#### **f) Pengukuran**

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung

dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.

- Bangunan monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan

biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

**g) Penilaian**

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

**h) Pengungkapan**

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

**6) DANA CADANGAN**

(01) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak

dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

- (02) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- (03) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

### **7) Aset Lain-Lain**

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- (01) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

- (02) **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

- (03) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

**Lain-Lain Aktiva** adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

## **b. Kewajiban**

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **1) Kewajiban Jangka Pendek**

- a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- (01) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

- (02) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

- (03) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.

- b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.
- d. Kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2019.

### **2) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

**c. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya neraca daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas sebagai berikut :

1. PENDAPATAN Rp. 0,00

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) :**

Tidak ada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan yang dianggarkan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2019.

2. BELANJA Rp 3.612.581.762,00

Belanja Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 4.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.612.581.762,00 atau 88,11% dan sisa sebesar Rp 487.418.238,00,00 atau 11,88%.

Belanja Daerah terdiri atas :

**a. Belanja Operasi**

**a.1. Belanja Pegawai Rp 470.428.750,00**

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 497.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 470.428.750,00. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Rincian Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)
	Anggaran 2019	Realisasi 2019	
1	2	3	4
<b>Belanja Pegawai</b>			
<b>Belanja Honorarium PNS</b>	<b>201.290.000,00</b>	<b>184.740.000,00</b>	<b>16.550.000,00</b>
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.700.000,00	71.650.000,00	10.050.000,00
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Belanja Honorarium PNS Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	116.040.000,00	110.540.000,00	5.500.000,00
<b>Belanja Honorarium Non Pns</b>	<b>296.400.000,00</b>	<b>285.688.750,00</b>	<b>10.711.250,00</b>





Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Belanja Modal

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)
	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(Rp)
1	2	3	4
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur	9.867.004,00	9.768.334,00	98.670,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur Universal	9.867.004,00	9.768.334,00	98.670,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor	15.180.000,00	15.027.309,00	152.691,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.180.000,00	15.027.309,00	152.691,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	88.162.896,00	85.522.800,00	2.640.096,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer	64.633.896,00	62.238.000,00	2.395.896,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.529.000,00	23.284.800,00	244.200,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>113.209.900,00</b>	<b>110.318.443,00</b>	<b>2.891.457,00</b>

2. BEBAN Rp 3.684.825.043,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri atas :

a. Beban Pegawai Rp 470.428.750,00

Beban pegawai Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 470.428.750,00. Beban Pegawai terdiri atas :

a.1. Beban Honorarium PNS Rp 184.740.000,00

Jumlah belanja Honorarium PNS pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 184.740.000,00 sedangkan beban Honorarium PNS sebesar Rp 184.740.000,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.650.000,00	71.650.000,00	0,00	
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
Beban Honorarium PNS Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang	110.540.000,00	110.540.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN HONORARIUM PNS</b>	<b>184.740.000,00</b>	<b>184.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**a.2. Beban Honorarium Non PNS** **Rp 285.688.750,00**

Jumlah belanja Honorarium Non PNS pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 285.688.750,00 sedangkan beban Honorarium Non PNS sebesar Rp 285.688.750,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	285.688.750,00	285.688.750,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN HONORARIUM NON PNS</b>	<b>285.688.750,00</b>	<b>285.688.750,00</b>	<b>0,00</b>	

**b. Beban Barang dan Jasa** **Rp 3.031.834.569,00**

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 3.031.834.569,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri atas :

**b.1. Beban Bahan Pakai Habis** **Rp 143.928.450,00**

Beban barang pakai habis adalah beban berupa konsumsi barang pakai habis (persediaan). Beban barang pakai habis dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban barang pakai habis dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah barang pakai habis pada awal periode per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dan jumlah belanja barang pakai habis pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 143.928.450,00.

Rincian Beban Bahan Habis Pakai :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	142.378.450,00	142.378.450,00	0.00,-	
Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0.00,-	
Beban Bahan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0.00,-	
<b>JUMLAH BEBAN BAHAN PAKAI HABIS</b>	<b>143.928.450,00</b>	<b>143.928.450,00</b>	<b>0.00,-</b>	

**b.2. Beban Jasa Kantor****Rp 11.500.000,00**

Beban jasa kantor adalah beban berupa konsumsi jasa selama periode berjalan. Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Jumlah belanja jasa kantor pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 11.500.000,00 sedangkan beban jasa sebesar Rp 11.500.000,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN JASA KANTOR</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**b.3. Beban Premi Asuransi****Rp 8.441.035,00**

Jumlah belanja premi asuransi pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8.441.035,00 sedangkan beban premi asuransi sebesar Rp 8.441.035,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Premi Asuransi Kesehatan	8.441.035,00	8.441.035,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN PREMI ASURANSI</b>	<b>8.441.035,00</b>	<b>8.441.035,00</b>	<b>0,00</b>	

**b.4. Beban Cetak dan Penggandaan****Rp 55.255.625,00**

Jumlah belanja cetak dan penggandaan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 55.255.625,00 sedangkan beban cetak dan penggandaan sebesar Rp 55.255.625,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

Rincian Beban Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Penggandaan	45.930.625,00	45.930.625,00	0,00	
Beban Penjilidan	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN CETAK DAN PENGKANDAAAN</b>	<b>55.255.625,00</b>	<b>55.255.625,00</b>	<b>0,00</b>	

**b.5. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp 1.500.000,00**

Jumlah belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.500.000,00 sedangkan beban sewa sewa rumah/gedung/gudang/parkir sebesar Rp 1.500.000,00.

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**b.6. Beban Sewa Sarana Mobilitas Rp 750.000,00**

Jumlah belanja sewa sarana mobilitas pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 750.000,00 sedangkan beban sewa sarana mobilitas sebesar Rp 750.000,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	750.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**b.7. Beban Makanan dan Minuman Rp 59.262.500,00**

Jumlah belanja makanan dan minuman pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 59.262.500,00 sedangkan beban makanan dan minuman sebesar

Rp 59.262.500,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

Rincian Beban Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Makanan dan Minuman Rapat	59.262.500,00	59.262.500,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>59.262.500,00</b>	<b>59.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	

**b.8. Beban Perjalanan Dinas** **Rp 2.740.946.959,00**

Beban perjalanan dinas adalah beban berupa perjalanan dinas selama periode berjalan. Beban perjalanan dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah belanja perjalanan dinas pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.740.946.959,00 sedangkan beban perjalanan dinas sebesar Rp 2.740.946.959,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.953.151.000,00	1.953.151.000,00	0,00	
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	787.795.959,00	787.795.959,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>2.740.946.959,00</b>	<b>2.740.946.959,00</b>	<b>0,00</b>	

**b.9. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BIMTEK PNS**

**Rp 10.250.000,00**

Jumlah belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan BIMTEK PNS pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 10.250.000,00 sedangkan beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan BIMTEK PNS sebesar Rp 10.250.000,00. Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp 0,00.

Rincian Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan BIMTEK PNS adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Bimbingan Teknis	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BEBAN KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, DAN BIMTEK PNS</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**c. Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp 182.561.724,00**

Beban penyusutan dan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur masa manfaatnya. Jumlah beban penyusutan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 182.561.724,00.

Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut :

URAIAN	BEBAN	KET.
Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	77.272.696,00	
Beban Penyusutan Alat Ukur	1.302.446,00	
Beban Penyusutan Komputer	90.238.839,00	
Beban Penyusutan Alat Studio	2.494.800,00	
<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>182.561.724,00</b>	

**4. ASET** **Rp 269.348.921,00**

**Aset Lancar** **Rp 0,00**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari :

- 1. Kas Bendahara Penerimaan**  
Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00.
- 2. Kas Bendahara Pengeluaran**  
Saldo kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00.
- 3. Investasi Jangka Pendek**  
Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00.
- 4. Piutang Pendapatan**  
Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00.
- 5. Piutang Lain-lain**  
Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00.
- 6. Penyisihan Piutang**  
Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00.

**7. Beban Dibayar Dimuka**

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 adalah Rp 0,00.

**8. Persediaan**

Jumlah saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada seluruh unit kerja per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)
Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00
Alat Listrik dan Elektronik	0,00
Persediaan Perangko, Materai, Benda Pos Lainnya	0,00
Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
Isi Tabung Gas	0,00
Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00
Jumlah	0,00

**Aset Tetap** **Rp 269.348.921,00**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset tetap Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 269.348.923,00 sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember per 2018 adalah sebesar Rp 341.592.202,00. Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	2019	2018
Tanah	-	-
Peralatan Dan Mesin	1.276.172.129,00	1.165.853.686,00
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, irigasi, instalasi	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(1.006.823.208,00)	(824.261.484,00)
Jumlah	269.348.921,00	341.592.202,00

**4.1 Tanah** **Rp 0,00**

Tanah yang dimiliki Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00.



4.2 Peralatan dan mesin

Rp 1.276.172.129,00

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.276.172.129,00 sedangkan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.165.853.686,00. Terdapat penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 110.318.443,00.

Rincian Peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
Saldo Awal per 01 Januari 2019 (a)	Rp	1.165.853.686,00
<i>Penambahan</i>		
- Pembelian	Rp	110.318.443,00
- Transfer masuk	Rp	0,00
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan kode rekening 5.2.2.)	Rp	0,00
- Pengembangan	Rp	0,00
- Reklasifikasi masuk	Rp	0,00
- Pengalihan (masuk)	Rp	0,00
Jumlah (b)	Rp	1.276.172.129,00
<i>Pengurangan</i>		
- Penjualan	Rp	0,00
- Pengalihan (keluar)	Rp	0,00
- Reklasifikasi keluar	Rp	0,00
- Koreksi Nilai/Penyusutan	Rp	0,00
Jumlah (c)	Rp	0,00
Kenaikan /penurunan ( b-c)	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2019 (a+(b-c))	Rp	1.276.172.129,00

Adapun rincian pembelian peralatan dan mesin yaitu sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Pengadaan alat ukur universal	Rp 9.768.334
Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	Rp 15.027.309
Pengadaan personal komputer	Rp 62.238.000
Pengadaan peralatan personal komputer	Rp 23.284.800
Jumlah	Rp 110.318.443

**4.3 Gedung dan Bangunan** **Rp 0,00**

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00.

**4.4 Jalan irigasi dan Jaringan** **Rp 0,00**

Jalan irigasi dan Jaringan yang dimiliki Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00.

**4.5 Aset tetap lainnya** **Rp 0,00**

Aset tetap lainnya yang dimiliki Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00.

**4.6 Akumulasi Penyusutan** **Rp (1.006.823.208,00)**

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dimiliki Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam per 31 Desember 2019 sebesar Rp (1.006.823.208,00).

Perbandingan rincian akumulasi penyusutan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

JENIS PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2018 (Rp)	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PER 31 DESEMBER 2019 (Rp)
		SEMESTER I (Rp)	SEMESTER II (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Berat	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan	(699.192.694,00)	(44.839.104,00)	(32.433.592,00)	(776.465.390,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel/Alat Ukur	-	(325.612,00)	(976.834,00)	(1.302.446,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Rumah Tangga	(121.534.490,00)	(47.300.074,00)	(54.191.708,00)	(223.026.272,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(3.534.300,00)	(1.247.400,00)	(1.247.400,00)	(6.029.100,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	-	-	-
<b>JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(824.261.484,00)</b>	<b>(93.712.190,00)</b>	<b>(88.849.534,00)</b>	<b>(1.006.823.208,00)</b>

**4.7 Aset lainnya** **Rp 0,00**

Aset lainnya berupa aset lain-lain yang dimiliki Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00.

5. KEWAJIBAN

Rp 0,00

Kewajiban terdiri atas :

1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00.

6. EKUITAS

Rp 269.348.921,00

Perubahan Ekuitas merupakan nilai ekuitas awal dan surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi ekuitas lainnya).

a. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp 341.592.202,00.

b. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah defisit LO untuk per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (3.684.825.043,00)

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar akibat adanya koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp 0,00.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.612.581.762,00

e. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 269.348.921,00. Rincian Nilai Ekuitas pada akhir periode per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN	EKUITAS AWAL (Rp)	SURPLUS (DEFISIT) LO (Rp)	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR (Rp)	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASI KAN	EKUITAS AKHIR (Rp)
Perubahan Ekuitas	341.592.202,00	(3.684.825.043,00)	0,00	3.612.581.762	269.348.921,00
JUMLAH EKUITAS	341.592.202,00	(3.684.825.043,00)	0,00	3.612.581.762	269.348.921,00

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis kas masih diterapkan untuk Laporan Realisasi Anggaran karena penyusunan anggaran masih menggunakan basis kas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Januari 2019

**Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM,**

**SAID SALIM, S.Kom  
Pembina  
NIP. 197207041993031004**

---

## DAFTAR LAMPIRAN

---

1. Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Neraca
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Rekonsiliasi Persediaan Triwulan IV
7. Rekonsiliasi Aset Triwulan IV